

PERAN *STAKEHOLDER* DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA: STUDI DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

Eko Setyo Widodo¹, Kris Nugroho²

¹*Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
esetyowidodo@gmail.com*

²*Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
kris.nugroho@fisip.unair.ac.id*

Abstract: *The family planning village in Jambewangi village of Banyuwangi regency has been awarded the title of province and national pilot KB Village in the year of 2019. Motivated by the commitment and active role of various components of stakeholders to foster and accompany the society in the process of implementation of the KB village policy. All stakeholders involved can provide coaching and facilitation to improve the utilization of all potential of the welfare and acceleration of the development of Jambewangi village. Each stakeholder involved has different influences and interests. It is also influenced by power or authority over the policy itself. This study was qualitative with a descriptive approach. Data were collected using observation and deep interviews. After examining the validity, data were analyzed by presenting the data that is simultaneously analyzed and interpreted according to the analysis theory of stakeholder role to be concluded. This study explains the analysis of the role of stakeholders involved in the implementation of family planning village in Jambewangi village of Banyuwangi regency, which are grouped based on interests and power on policies in accordance with Bryson's stakeholder analysis theory. From the results of this study, it was concluded that the grouping of stakeholders in this study had the aim to find out the parties involved in the implementation of the policy including its roles, interests, and impacts arising from the implementation of the policy program.*

Keywords: *Stakeholders, policy implementation, KB village.*

PENDAHULUAN

Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar kewenangan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program keluarga berencana erat kaitannya dengan urusan pengendalian penduduk dengan cara pembatasan kelahiran dengan metode penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya (BKKBN, 2015). BKKBN terus menunjukkan komitmennya dalam rangka penguatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Salah satu wujud komitmennya adalah membuat inovasi kebijakan kampung KB. Kampung KB menjadi inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan program-program BKKBN secara utuh di lini lapangan. Hal tersebut sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu memulai pembangunan dari pinggiran. Serta menjadi agenda prioritas pemerintah, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan atau sebutan lainya dengan kriteria tertentu yang melaksanakan program pembangunan secara komprehensif dan terintegrasi dengan program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga di lini lapangan. Tujuan umum dibentuk kampung KB adalah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat

desa/ kelurahan atau yang setara program kependudukan, keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Secara khusus bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta atau bisa disebut para pemangku kepentingan dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di kampung KB adalah Keluarga, Remaja, Penduduk Usia Lanjut (Lansia), Pasangan Usia Subur (PUS), Keluarga dengan balita, Keluarga dengan remaja, Keluarga dengan lansia dan sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kriteria pembentukan kampung KB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BKKBN dibagi menjadi 3 kriteria. Kriteria utamanya adalah jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I diatas rata-rata KPS dan KS tingkat desa di mana kampung tersebut berada seta jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa di mana kampung KB tersebut berlokasi. Kriteria wilayahnya adalah kumuh, pesisir/ nelayan, Daerah Aliran Sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata dan tingkat kepadatan serta jumlah penduduk yang tinggi. Sedangkan kriteria khusus di antaranya adalah ketersediaan data dan peta keluarga, capaian kesertaan KB dan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) masih rendah, dan lain sebagainya.

Kampung KB dicanangkan dan diresmikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 di Desa Janawi, Cirebon Jawa Barat. Pada awal pembentukan kampung KB adalah satuan wilayah setingkat dusun. Kemudian pada tahun 2018, ditetapkan bahwa satuan wilayahnya menjadi setingkat desa. Pada tahun 2017 sebanyak 1200 kampung KB telah terbentuk. Termasuk di Jawa Timur, penancangan awal setiap kabupaten/ kota memiliki satu kampung KB. Hingga pada akhirnya pada tahun 2018, setiap kecamatan di Jawa Timur membentuk kampung KB, sehingga sampai saat ini kurang lebih terdapat 725 kampung KB berdiri dan terbentuk di Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2018, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggagas perlombaan kampung KB. Kemudian terpilihlah kampung KB Desa Jambewanbi Kabupaten Banyuwangi sebagai juara perlombaan kampung KB percontohan tingkat provinsi Jawa Timur. Perlombaan ini menjadi yang pertama di Indonesia. Kemudian di tahun 2019, kampung KB Desa Jambewangi kembali terpilih sebagai nominasi perlombaan kampung KB percontohan tingkat nasional. Kriteria penilaiannya meliputi komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan di semua tingkatan, integritas lintas sektor dan integritas program KKBPK, optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra/*stakeholder*, semangat dan dedikasi para pengelola program di lini lapangan (PKB dan PKK), serta partisipasi aktif masyarakat. Pada Juli 2019, kampung KB Desa Jambewangi resmi diumumkan sebagai salah satu juara kampung KB percontohan tingkat nasional dengan kategori pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah daerah serta pengelola program dalam memberikan stimulan untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala potensi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan wilayah yang dimulai

dari desa. Hal tersebut sesuai dan tertuang dalam surat penetapan kampung KB percontohan tingkat nasional yang ditanda tangani oleh Kepala BKKBN.

Kategori tersebut menggambarkan bagaimana keterlibatan dan peran dari seluruh pemangku kepentingan turut serta mengambil bagian dalam rangka menyukseskan program kampung KB di Desa Jambewangi. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam kampung KB Desa Jambewangi tergabung dan termasuk dalam susunan kelompok kerja di berbagai tingkatan. Mulai dari kelompok kerja kampung kb tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa turut berperan dan bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mendukung kampung KB Desa Jambewangi. *Stakeholder* yang terlibat, tidak hanya berasal dari unsur kedinasan yang mengurus keluarga berencana saja. Terdapat pula dari unsur luar, di antaranya adalah unsur Dinas Kesehatan, IDI, IBI, PKK, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Bina Marga, dan lain sebagainya.

Keberhasilan kampung KB Desa Jambewangi Kabupaten Banyuwangi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terutama dalam hal siapa saja *stakeholder* yang terlibat, dan peranan seperti apa yang dimainkan *stakeholder* tersebut dalam proses implementasi kebijakan kampung KB tersebut. Predikat kampung KB percontohan tingkat nasional diperoleh juga melalui proses yang tidak mudah. Komitmen dan juga koordinasi yang dijalankan seluruh *stakeholder* yang terlibat dapat menghantarkan ke posisi seperti sekarang ini. Tentu hal tersebutlah yang melatarbelakangi dipilihnya kampung KB Desa Jambewangi sebagai kampung KB percontohan dan dapat memberi contoh kampung KB diwilayah lain.

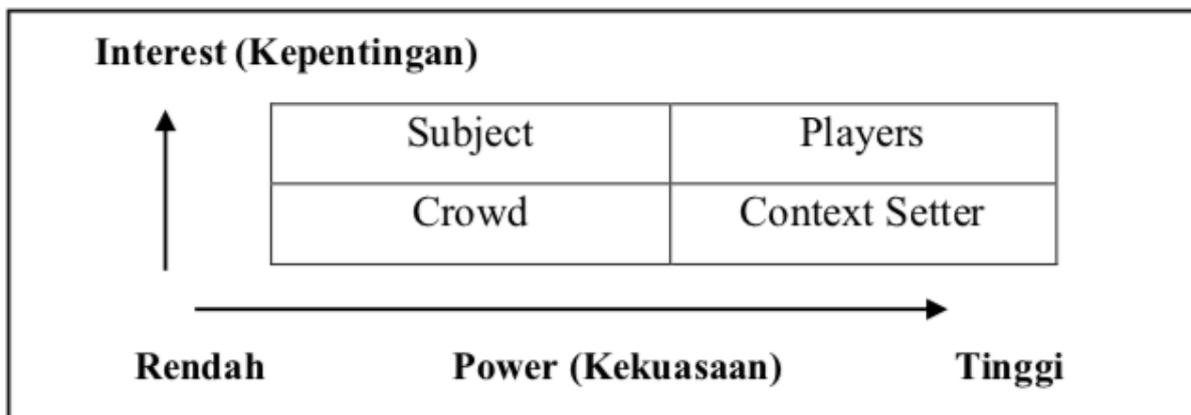
Mengacu pada latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kampung KB di Desa Jambewangi yang menjadikannya sebagai kampung KB percontohan tingkat provinsi maupun nasional dilihat dari beberapa faktor utama keberhasilan kampung KB di antaranya meliputi: (1) Komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan di semua tingkatan, (2) Integritas lintas sektor dan integritas program KKBPK, (3) Optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra/*stakeholder*, (4) Semangat dan dedikasi pengelola program KKBPK di lini lapangan, (5) Partisipasi aktif dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara dalam penelitian yang melingkupi pengumpulan data dan informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif dimungkinkan untuk melakukan eksplorasi atau penggalian data secara rinci terhadap subjek penelitian (Horison, 2009). Fokus penelitiannya adalah melihat peran *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kampung KB di Kabupaten Banyuwangi terutama di Desa Jambewangi yang memperoleh predikat juara 1 (satu) kampung KB percontohan tingkat provinsi dan nasional. Lokasi penelitiannya berada di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu terdiri dari wawancara atau pertemuan langsung

antara peneliti dan informan, dan observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan pendekatan sekunder yaitu melalui tinjauan pustaka atau mengumpulkan bukti-bukti yang berasal dari dokumen, surat, foto dan lain sebagainya (Gunawan, 2014). Selanjutnya adalah menganalisis data, dimulai dari membuat transkrip data mentah yang kemudian dikategorikan berdasarkan subjek dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap transkrip yang berusaha mencari makna dominan maupun makna tersembunyi dalam teks, dan kemudian mencari pemahaman dan interpretasi terhadap temuan data.

Penelitian ini menggunakan teori analisis peran *stakeholder* menurut Brysson. Brysson mengartikan *stakeholder* adalah sebagai individu, kelompok atau bahkan sebuah organisasi yang memiliki perhatian dengan sumber daya atau hasil dari sebuah pembangunan atau sebuah program kebijakan (Freeman, 1984). Sehingga peran *stakeholder* sangat mempengaruhi proses pembangunan atau sesuatu yang berhubungan dengan sebuah program kebijakan. Analisa peran *stakeholder* menurut Brysson dimulai dari menyusun *stakeholder* yang terlibat, pada matriks dua kali dua menurut *interest* (kepentingan) dan *power* (kekuasaan). *Interest* dalam hal ini adalah kepentingan *stakeholder* terhadap pembangunan, sedangkan *power* adalah kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan ataupun peraturan-peraturan pembangunan (Bryson, 2004).



Bagan 1. Matriks Analisis Peran *Stakeholder* Menurut Brysson

Sumber: Bryson (2004)

Penjelasan dari matriks di atas adalah sebagai berikut:

- a) *Context Setter* adalah *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang tinggi tetapi sedikit memiliki kepentingan, sehingga yang ada di dalamnya dapat menjadi tantangan atau risiko yang signifikan dan harus terus dipantau.
- b) *Players* adalah *stakeholder* yang paling berperan aktif, karena *stakeholder* tersebut mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap sebuah implementasi kebijakan.

- c) *Subject* adalah *stakeholder* yang mempunyai kepentingan yang tinggi, tapi pengaruhnya kecil. Walaupun demikian mereka mendukung pelaksanaan kegiatan, namun kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun mereka dapat memiliki pengaruh jika membentuk sebuah aliansi dengan *stakeholder* lainnya.
- d) *Crowd* adalah *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Namun hal ini harus dijadikan pertimbangan untuk mengikutsertakan *stakeholder* ini dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain, sehingga perlu untuk dijadikan tambahan pertimbangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen yang Kuat dari Pemangku Kebijakan di Semua Tingkatan

Program ini dijalankan oleh *stakeholder* terkait secara bersama-sama diseluruh tingkatan. Sebagai salah satu syarat pembentukan kampung KB adalah dibentuknya kelompok kerja (pokja) diseluruh tingkatan wilayah. Baik ditingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, hingga tingkat desa. Pokja ini memiliki tugas untuk saling mengambil bagian dalam menjalankan kampung KB di setiap tingkatan wilayah. Koordinasi setiap pokja digawangi oleh kepala daerah beserta jajarannya. Sehingga komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan atau *stakeholder* di semua tingkatan wilayah sangat penting adanya. Komitmen dari *stakeholder* terkait dapat ditunjukkan melalui berbagai macam bentuk dukungan. Dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan yang berupa materiil atau bantuan fisik, dapat juga bantuan non fisik atau kontribusi tenaga dan pikirannya demi keberhasilan kampung KB.

Komitmen beberapa pemangku kepentingan pada implementasi kebijakan kampung KB di Desa Jambewangi dapat dilihat dari laporan dukungan anggaran tahun 2016 hingga 2019. Terdapat berbagai bentuk jenis dukungan, baik materiil maupun non materiil. Dukungan materiil dan non materiil dari berbagai *stakeholder* dan lintas sektor, menunjukkan komitmennya terhadap program ini. Berikut adalah data dukungan pada kampung KB Desa Jambewangi.

Tabel 1. Data Dukungan Kampung KB Desa Jambewangi Tahun 2016-2019

No	Pemangku Kepentingan	Bentuk/ Nominal Dukungan
1	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	Rp 20.000.000
2	Dinas Pemberdayaan perempuan dan KB	Rp. 117.000.000
3	Dinas Pertanian	Rp 2.500.000.000
4	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Rp 50.000.000
5	Pemerintah Desa Jambewangi	Rp 456.000.000
6	Universitas 17 Agustus Banyuwangi	Pendataan keluarga
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelayanan pembuatan akta kelahiran

Sumber: Laporan Dukungan Kampung KB Desa Jambewangi Tahun 2016-2019

Optimalisasi Fasilitas dan Dukungan Mitra/ Stakeholder

Kampung KB merupakan program bersama dan milik kita bersama. Sehingga kampung KB tidak dapat berjalan dengan *stakeholder* yang terkait program KB saja. Melainkan harus melibatkan dan menjalankan koordinasi dengan lintas sektor, guna mendukung pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BKKBN dalam petunjuk pelaksanaan kampung KB, skema model penggarapan kampung KB memungkinkan adanya keterlibatan lintas sektor terhadap program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Keterlibatan lintas sektor guna mendorong program-program yang ada di kampung KB dapat berjalan dengan baik. Beberapa fasilitas atau bantuan telah diberikan oleh beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam kampung KB. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Fasilitasi atau dukungan yang diberikan oleh lintas sektor dan mitra kerja, menunjukkan peran aktif dari lintas sektor dan mitra kerja kampung KB. Manfaat dari fasilitasi dan bantuan yang diberikan tentu dirasakan oleh masyarakat. Adanya fasilitas dan dukungan dari *stakeholder*, lintas sektor dan mitra kerja tersebut, mendukung penguatan kampung KB di Desa Jambewangi, sehingga ditetapkan sebagai kampung KB percontohan tingkat provinsi dan nasional.

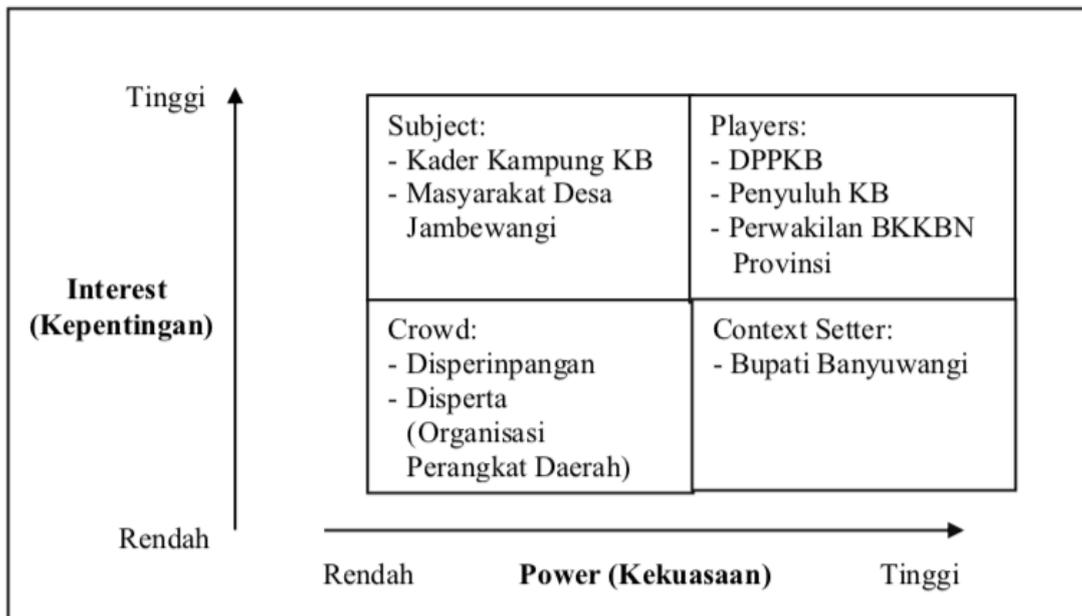
Partisipasi Aktif Masyarakat

Keterlibatan atau peran aktif dari masyarakat sangat mempengaruhi proses pelaksanaan sebuah kebijakan. Masyarakat sebagai subjek maupun objek dalam kampung KB. Masyarakat Desa Jambewangi sangat terbuka dan mendukung program kampung KB. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal, misalnya: gotong royong dalam pencahangan dan peresmian kampung KB di Dusun

Sidomulyo, turut aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kader kampung KB, kerja sama dalam menyambut tamu dan lain sebagainya. Selain keterlibatan secara fisik atau tenaga, masyarakat juga dengan sukarela memberikan bantuan dana untuk mendukung pelaksanaan kampung KB. Dana dikumpulkan oleh masyarakat dan direalisasikan dalam berbagai bentuk.

Analisa Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Kampung KB di Desa Jambewangi Kabupaten Banyuwangi

Menurut Reed dalam Roslinda, menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan tahapan tata cara berikut: pertama, identifikasi siapa saja yang berperan dan memiliki kepentingan, Kedua, mengelompokkan dan mengkategorikan para pemangku kepentingan. Ketiga, adalah meneliti hubungan antar pemangkun kepentingan (Rosalinda, 2012). Sehingga dalam penelitian ini, analisis peran dan hungan antar *stakeholder* yang merupakan keseluruhan aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan kampung KB di Desa Jambewangi Kabupaten Banyuwangi. Analisis menggunakan teori analisis peran *stakeholder* dari Bryson adalah dimulai dari mengelompokkan *stakeholder* yang terlibat ke dalam matriks dua kali dua berdasarkan *interest* (kepentingan) dan *power* (kekuasaan).



Bagan 2. Analisa Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Kampung KB Desa Jambewangi Kabupaten Banyuwangi Menurut Brysson

Sumber: Bryson (2004)

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama jajarannya dalam hal ini direpresentasikan sebagai *context setter* dalam implementasi kebijakan kampung KB di Kabupaten Banyuwangi. Dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188/155/KEP/429.011/2016 tentang Susunan Personalia Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB tingkat kabupaten. Bupati Banyuwangi berperan

sebagai pelindung dalam Pokja ini. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan arah gerak dan tujuan pelaksanaan program.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), sebagai *leading sector*. Karena program ini terkait dengan visi, misi, tugas dan kewenangannya sebagai pengelola program KB. Sehingga DPPKB memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap implementasi kebijakan kampung KB di Banyuwangi terutama Desa Jambewangi. Memiliki pengaruh kuat karena sebagai ketua pokja dan komando program yang berhubungan dengan KB menjadi kendalanya. Sehingga kepentingannya juga tinggi, karena sukses dan tidaknya program KB di Kabupaten Banyuwangi ditentukan olehnya.

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Surat Keputusan Camat Sempu dan Kepala Desa Jambewangi menjabat sebagai sekretaris. Selain itu Penyuluh KB merupakan aparatur BKKBN di lini lapangan. Penyuluh KB ini memiliki pengaruh yang sangat tinggi serta memiliki kepentingan yang sangat besar. Karena kampung KB ini merupakan inovasi kebijakan yang dibuat oleh BKKBN. Komitmen terhadap program kampung KB dapat dilihat saat peran aktif dalam proses pembentukan kampung KB, implementasi bahkan sampai proses persiapan menuju lomba kampung KB tingkat nasional. Segala kegiatan kampung KB, penyuluh KB selalu hadir dan memberikan pemahaman mendalam mengenai kampung KB dan program yang ada di dalamnya.

Kader kampung KB dan masyarakat Desa Jambewangi dikelompokkan sebagai *stakeholder subject*. Memiliki kepentingan atau harapan yang tinggi terhadap program ini. Hadirnya para kader ini tentunya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB. Kader adalah sukarelawan yang peduli terhadap kampung KB ini. Dibentuk oleh, dari dan untuk warga masyarakat secara mandiri dan tanpa dibayar guna meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai kegiatan yang kreatif dan inovatif. Kader kampung KB juga berjalan untuk mendata keluhan dan permasalahan warga. Kemudian didata dan saat ada diskusi bersama *stakeholder* kampung KB yang lain dipaparkan dan dicarikan solusi bersama. Kemudian masyarakat desa, memiliki kepentingan tinggi terhadap kampung KB. Guna dapat membantu meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan Disperinangan dan Disperta merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan kekuasaan atau wewenang yang rendah terhadap kebijakan. Posisi dalam Pokja hanya sebagai bidang-bidang yang mendukung implementasi kebijakan kampung KB. Sehingga kedua dinas ini bersama dinas lainnya hanya sebagai *stakeholder* kelompok *crowd*. *Stakeholder* pendukung dalam hal peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Kampung KB Desa Jambewangi di Kabupaten Banyuwangi telah meraih gelar kampung KB percontohan tingkat provinsi dan nasional. Hal tersebut karena kampung KB Desa Jambewangi telah memenuhi 5 kriteria penilaian keberhasilan kampung KB. Kriteria tersebut diantaranya meliputi

komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan disemua tingkatan, optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra/ *stakeholder*, dan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa. Beberapa kriteria tersebut sangat erat kaitannya dengan peran atau keterlibatan *stakeholder* atau para pemangku kepentingan.

Stakeholder atau pemangku yang terlibat dalam implementasi kebijakan kampung KB adalah pihak-pihak yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) di masing-masing tingkatan, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Landasan hukumnya adalah surat keputusan kepala daerah, camat dan kepala desa. Beberapa *stakeholder* yang terlibat di antaranya: Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Penyuluh KB Kecamatan Sempu, Pemerintah Desa dan Kader Kampung KB. Masing-masing stakeholder dan lintas sektor yang terlibat mempunyai peranan yang berbeda. Peranan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan kampung KB di Desa Jambewangi juga untuk mengetahui peranan dari masing-masing *stakeholder* tersebut. Dalam rangka untuk mengetahui peranan *stakeholder*, perlu melakukan analisis mendalam terkait hal tersebut.

Dalam penelitian ini, analisis peran *stakeholder* menggunakan teori dari Bryson. Bryson menganalisis *stakeholder* dengan mengelompokkan *stakeholder* tersebut kedalam matriks dua kali dua berdasarkan interset (kepentingan) dan power (pengaruh) dengan 4 kategori kelompok. Hasilnya adalah sebagai berikut: (1) Bupati Banyuwangi sebagai *context setter* atau penentu arah kebijakan, sehingga memiliki pengaruh yang tinggi dalam menentukan personalia terkait program ini, (2) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, DPPKB dan Penyuluh KB sebagai *players* atau pemain utama dalam kebijakan ini. Memiliki pengaruh dan kekuasaan yang tinggi. Karena memang ketiganya sebagai penanggung jawab untuk menyukseskan program keluarga berencana melalui kampung KB, (3) Kader kampung KB dan masyarakat desa, sebagai *subject*. Memiliki kepentingan atau harapan yang tinggi terhadap kampung KB guna untuk meningkatkan kesejahteraannya, (4) Disperta dan Disperinpangan sebagai *crowd* atau *stakeholder* pendukung. Memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap program ini. Namun peran dan dukungannya turut mendorong keberhasilan dari program.

Pengelompokan *stakeholder* dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pihak-pihak terkait dalam program yang sedang dijalankan dalam implementasi kebijakan kampung KB meliputi peran-peranya, kepentingannya, dan dampak yang ditimbulkan dari dilaksakannya program kebijakan tersebut. Setiap *stakeholder* tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing, yang selanjutnya bersama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk mengelola program kebijakan tersebut dengan memanfaatkan sumberdaya yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Bryson JM (2004) *What Do When Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubbert H. Humphrey Institute of Public Affairs.

Freeman RE (1984) *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.

Gunawan I (2014) *Metode Penelitian Kualitatif . Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Horison L (2009) *Motodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.

Roslinda E (2012) *Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. JMHT Vol. XVIII.